



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

# RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2021







# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 14 September 2021

Kepada Yth.  
**Seluruh Kepala Perangkat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Kalimantan Timur**

di -  
Tempat

## SURAT EDARAN

Nomor : 050/ ~~5120~~ /B.PPEPD-Bapp/2021

### TENTANG

#### **Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2021**

Sesuai amanat pasal 363 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Perkada tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh kepala Perangkat Daerah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 36 tahun 2021 tentang Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021;
2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi :
  - a. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RENJA tahun 2021 mempedomani sebagaimana tata cara penyusunan Perubahan RENJA Perangkat Daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017;
  - b. Indikator, target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dan pagu indikatif disesuaikan dengan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang telah ditetapkan;
3. Rancangan akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka (2) selanjutnya disampaikan kepada Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur paling lambat tanggal 25 September 2021 untuk dilakukan verifikasi;
4. Melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RENJA berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur;
5. Rancangan akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam angka (4) selanjutnya disampaikan kembali kepada Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur paling lambat tanggal 30 September 2021 untuk diajukan dan ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Gubernur Kalimantan Timur,  
  
  
**Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah dapat diselesaikan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah diamanatkan bahwa program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dirumuskan dalam RKPD untuk didanai oleh masing-masing provinsi pada tahun yang direncanakan sebagai penjabaran RPJMD pada tahun yang direncanakan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan kerangka makro rencana pembangunan jangka menengah dalam menyusun rencana kerja tahunan yang penjabarannya berpedoman pada rencana strategis yang efektif dan efisien yang mampu menghasilkan dampak pembangunan ekonomi, sosial budaya dan dampak lingkungan lainnya.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga dalam penyusunan perlu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa yang akan datang dan penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan pendapat sehingga tersusunnya Renja ini, diucapkan terima kasih.

Samarinda, September 2021  
**Kepala Pelaksana,**  
  
**Yudha Pranoto, S.E.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196408172010061001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU .....</b>	<b>8</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD .....	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>28</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	30
3.3. Program dan Kegiatan.....	31
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>35</b>
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan .....	35
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>37</b>

## LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

Memperhatikan dinamika isu strategis pandemic COVID 19 maka dilakukan perumusan rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Tahun 2021, dalam rangka penanganan covid 19 yang dikhususkan pada masyarakat terdampak dan rentan, serta mempertimbangkan pada kegiatan prioritas yang dilaksanakan. Dengan melakukan Refocusing/ realokasi dalam rangka penanganan covid 19 dan peningkatan ekonomi masyarakat terdampak wabah covid 19.

Rumusan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dan Perubahan berbagai kebijakan secara otomatis menyebabkan beberapa penyesuaian baik itu pada sasaran pembangunan, arah kebijakan maupun program ,kegiatan, sub kegiatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

### 1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) Badan Penangulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun periode tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan tahun ke -3 (tiga) yaitu merupakan penjabaran Renstra PD yang mengacu pada RKPD Perubahan, yang akan memberikan gambaran tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan yang

akan dikerjakan oleh PD dalam satu tahun anggaran, dan menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan PD sesuai Tupoksinya. Dengan muatan renja seperti program-program, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan perkiraan maju atau kebutuhan dana untuk tahun berikut.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja BPBD Tahun 2021 didasarkan pada pengkajian faktor-faktor internal dan eksternal yang memberi arah pada penentuan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan juga alokasi sumberdaya untuk mencapai hasil secara bermakna pada tahun 2021.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737)



5. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741)
6. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4828)
7. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4829)
8. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4830)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

14. Permendagri no. 54 tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019, Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2008 tentang Penyusunan RPB.
19. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 182, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4737);Tahun 2008 No. 15 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 39).
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025.

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 13 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
23. Peraturan Daerah Kaltim Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Reformance plan) tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu khususnya pada penanggulangan bencana di wilayah Kalimantan Timur guna menyesuaikan terhadap situasi terkini pada tahun pelaksanaan 2021 yang sedang berlangsung saat ini oleh Pemerintah, maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat, meliputi :

- a. Menjabarkan Rencana Strategik (Strategic Plan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kaltim;
- b. Mengoptimalkan tugas dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

## **2. Tujuan**

- a. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan;
- b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur khususnya BPBD Provinsi Kaltim;
- c. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD BPBD Provinsi Kaltim;
- d. Memberikan arah kebijakan dan strategi bagi seluruh aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Renstra PD tahun 2019-2023 yang dimanifestasikan kedalam program dan kegiatan;
- e. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh aparatur jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menentukan prioritas

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan penyesuaian pendanaan pagu indikatif;

- f. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi Pembangunan baik antar dinas/instansi terkait, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hubungan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Memberikan dasar bagi PD dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- h. Menciptakan iklim Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good Governance) dan dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas (Performance Accountability Report);
- i. Mengoptimalkan kerjasama dan Kemitraan dengan Lembaga Usaha dan Organisasi Masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (Pentahelix).
- j. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Kepala Badan (Kaban)/ Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Kaltim berikutnya;

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan RENJA mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja.

BAB I      Pendahuluan

BAB II     Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

BAB III    Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV    Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

BAB V     Penutup

## BAB II

# EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

## 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Pencapaian Renja s/d Tahun 2021 (Tahun Berjalan)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PAKET	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI TAHUN LALU (2020)			TARGET DAN REALISASI S/D FEBRUARI TAHUN 2021		
				TARGET	CAPAIAN	FISIK	TARGET	CAPAIAN	FISIK
Badan Penanggulangan Bencana Daerah							80.78		
		Belanja Tidak Langsung				67.41			
		Belanja Langsung				93.79			
1.05.07		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				92.89			
07.01		Pelaksanaan Administrasi				92.89			
07.01		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran							
07.01		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran							
		Jumlah Bulan Belanja Alat Tulis Kantor		10 Bulan	6 Bulan				
		Jumlah Materai yang tersedia		1,300 Lembar	313 Lembar				
		Jumlah Bulan Belanja Telepon		12 Bulan	7 Bulan				
		Jumlah Bulan Pembayaran Tagihan Air		12 Bulan	7 Bulan				
		Jumlah Bulan Pembayaran Tagihan Listrik		12 Bulan	7 Bulan				
		Jumlah Surat Kabar / Majalah		4,200 Orang/hari/Koran	1079 Orang/hari/Koran				
		Jumlah Bulan Belanja Kawat internet		12 Bulan	7 Bulan				
		Jumlah Bulan Belanja Pulsa Jaringan Peralatan EWS		12 Bulan	7 Bulan				
		Jumlah sewa stand dan perlengkapannya		2 Kegiatan	0 Kegiatan				
		Jumlah spanduk		15 Lembar	2 Lembar				
		Jumlah Bendera/umbul-umbul		1 Kegiatan	0 Kegiatan				
		Jumlah Bendera plastik		50 pack	0 pack				
		Jumlah Banner/Baliho		2 Buah	2 Buah				
		Jumlah Plakat		8 Buah	4 Buah				
		Jasa Tenaga Teknis/ Non Teknis		539 OB	336 OB				
		Jumlah Jasa KIR Kendaraan Bermotor							
		Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor							
		Jumlah Kertas Kop Dinas yang tercetak		24 Rim	6 Rim				
		Jumlah Map Kop Dinas yang tercetak		500 Lembar	650 Lembar				
		Jumlah Amplop Kop Dinas yang tercetak		24 Kotak	9 Kotak				
		Jumlah Kwitansi Dinas yang tercetak		24 Buku	18 Buku				
		Jumlah Form SPPD yang tercetak		24 Rim	5 Rim				
		Jumlah Lembar Disposisi Surat yang tercetak		12 Buku	0 Buku				
		Jumlah Stiker Kode Barang Aset yang tercetak		5,000 Lembar	0 Lembar				
		Jumlah Fotocopy yang tersedia		27,000 Lembar	12048 Lembar				
1.05.08		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				97.62			
08.02		Pemeliharaan Peralatan dan				89.89			
08.02		Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana				89.89			
		Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		4 Bulan	2 Bulan				
		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		10 Bulan	6 Bulan				
		Pemeliharaan Alat Kantor		10 Bulan	7 Bulan				
		Pemeliharaan Alat Early Warning Sistem (EWS)		7 Unit	7 Unit				
		Pemeliharaan Kantor dan Taman		10 Bulan	7 Bulan				
		Service kendaraan bermotor roda 4		7 Unit	6 Unit				
		Service kendaraan bermotor roda 2		1 Unit	1 Unit				
		Service kendaraan PB		10 Unit	4 Unit				
		Suku Cadang Kendaraan Roda 4		7 Unit	5 Unit				
		Suku Cadang Kendaraan Roda 2		1 Unit	1 Unit				
		Suku Cadang Kendaraan PB		10 Unit	0 Unit				
		Bahan Bakar Minyak/Gas kendaraan roda 4 dan 2							



		Pelumas Kendaraan Roda 4 dan Roda 2		3,000 Liter	1781 Liter	
		Bahan Bakar Minyak Roda 4, (Dexlite)		10 Unit	0 Unit	
		Jasa KIR roda 4		12 Unit	0 Unit	
		Jasa KIR roda 6 (Kendaraan PB)		13 Unit	7 Unit	
		Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4		5 Unit	3 Unit	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin/Output		2 Gedung	2 Gedung	
		Pemeliharaan Kantor dan gedung		1,400 Liter	1625 Liter	
		Bahan Bakar Minyak Roda 2 Pertalite		400 Liter	548 Liter	
		Bahan Bakar Minyak Roda 2 Caraka		504 Unit/Kali/Ltr	231 Unit/Kali/Ltr	
		Pelumas Minyak/Olie Roda 2 dan 4		21 Unit	5 Unit	
		Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 2		12 Unit	0 Unit	
		Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 6 (kendaraan PB)				
08.03	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana					99.45
08.03	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana					
08.03	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		20 Tabung	20 Tabung	99.45
08.03	AC Unit	AC unit		4 Unit	4 Unit	
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah					97.10
09.01	Koordinasi dan Konsultasi					99.56
09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman		400 Orang	102 Orang	99.56
		Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan		34 OT	34 OT	
		Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan		11 OT	11 OT	
		Jumlah pameran yang diikuti				
		Jumlah Spanduk yang tersedia				
		Jumlah Bendera/ Umbul Umbul yang tersedia				
		Jumlah Bendera Plastik yang tersedia				
		Jumlah Banner/Baliho yang tersedia				
09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya					85.47
09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					0.00
09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pakaian Seragam Lengkap Satpam		9 stel	9 stel	85.47
09.02	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					0.00
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan					98.70
10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan					98.70
10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah cetak Dokumen Perencanaan dan Anggaran		5 Dokumen	3 Dokumen	98.70
		Jumlah Penggandaan/fotocopy/penjilidan Dokumen Perencanaan dan Anggaran		5 Dokumen	0 Dokumen	
		Jumlah orang yang mendapat Makanan Dan Minuman Rapat		75 Orang	57 Orang	
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dlm rangka Penyusunan Dokumen dan Anggaran		6 OT	3 OT	
		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dlm rangka Penyusunan Dokumen dan Anggaran		3 OT	2 OT	
10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian					99.16
10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah cetak penggandaan Laporan		4 Laporan	3 Laporan	99.16
		Jumlah Penggandaan/fotocopy/penjilidan laporan		10,000 Lembar	0 Lembar	
		Jumlah orang yang mendapat Makanan Dan Minuman Rapat		100 Orang	83 Orang	
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dlm rangka Penyusunan Dokumen dan Anggaran		27 OT	24 OT	
		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah dlm rangka Penyusunan Dokumen dan Anggaran		6 OT	3 OT	
		Alat Tulis Kantor				
		Seminar kit kegiatan Rakorda PB				
		spanduk Rakor PB				
		penyiaran media elektronik Rakor PB				
		Undangan Rakorda-PB				
		Buku Panduan Rakorda-PB				
		Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan				
		Dokumentasi kegiatan Rakorda - PB ( foto dan film dokumenter )				
1.05.49	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana					86.84
49.13	Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring					86.11
49.13	Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggulangan Bencana					86.11
49.13	Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggulangan Bencana	Alat Tulis Kantor (revisi) kegiatan covid-19		2 Tahap	2 Tahap	86.11
		Bahan Bakar Minyak (revisi)		8,150 Liter	2418 Liter	
		multivitamin (revisi)		50 Box	45 Box	
		Air Untuk Penyemprotan Fasum dan Fasos Pemprov. Kaltim		30 Unit	0 Unit	
		Spanduk dan banner (revisi)		100 Buah	0 Buah	
		Baliho (revisi)		10 Buah	0 Buah	
		Media elektronik (revisi)		2 Bulan	0 Bulan	
		Media massa (revisi)		2 Bulan	0 Bulan	
		Cetak (revisi)		2 Tahap	2 Tahap	
		Penggandaan/Fotocopy/Penjilidan (revisi)		2 Tahap	2 Tahap	
		Dokumentasi (revisi)		2 Tahap	2 Tahap	
		Makanan Dan Minuman Rapat (revisi)		2,000 Kotak	697 Kotak	
		Alat Tulis Kantor Kegiatan Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring		1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		Alat Tulis Kantor kegiatan Rapat Koordinasi Kedaruratan dan Logistik Se Kaltim Tahun 2020		1 Kegiatan	0 Kegiatan	
		Alat Tulis Kantor kegiatan Kegiatan Rakorda PB		1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		Spanduk Kegiatan Rapat Koordinasi Kedaruratan dan Logistik Tahun 2020		1 Kegiatan	0 Kegiatan	
		spanduk Rakor PB		3 Lembar	3 Lembar	
		Buku Panduan Rapat Koordinasi Kedaruratan dan Logistik Se Kaltim		1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		undangan Rakor PB		120 Lembar	120 Lembar	
		Buku Panduan Rakorda PB		120 Buku	120 Buku	
		Foto Rakor PB		1 Kegiatan	0 Kegiatan	
		Makanan dan Minuman Rapat Rakor PB		90 Kotak	90 Kotak	

		Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Rapat Koordinasi Kedaruratan dan Logistik		30 Kotak	30 Kotak	
		makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Koordinasi Kedaruratan dan Logistik Se Kaltim Tahun 2020		75 Pax	75 Pax	
		Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kegiatan Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggulangan Bencana		135 OT	71 OT	
		Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kegiatan Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggulangan Bencana		6 OT	6 OT	
		Honorarium Narasumber kegiatan Rakor PB		6 Orang	6 Orang	
		Honorarium Narasumber kegiatan Rakor Kedaruratan dan Logistik		3 Orang	3 Orang	
		Bahan Bakar Minyak kendaraan dan peralatan PB				
		Bahan Obat-Obatan kegiatan Tanggap Darurat Banjir				
		Persediaan Makanan Pokok kegiatan Tanggap Darurat Banjir				
		Perlengkapan Berbahan Linen kegiatan Tanggap Darurat Banjir				
		Paket/Pengiriman kegiatan Tanggap Darurat Banjir				
		Spanduk Kegiatan				
		Jasa Transportasi dan Akomodasi kegiatan Tanggap Darurat Banjir				
		Kebutuhan Pasien kegiatan Tanggap Darurat Banjir				
		Jasa Service kegiatan Tanggap Darurat Banjir				
		Penggantian Suku Cadang kegiatan Tanggap Darurat Banjir				
		Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas kegiatan Tanggap Darurat Banjir				
		Bahan Pelumas Kendaraan PB				
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan				
		Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar				
		Makanan Dan Minuman Harian Pegawai kegiatan Tanggap Darurat Banjir				
		Makanan dan Minuman Rapat				
		makanan dan minuman kegiatan/pelatihan				
		Pakaian Kerja Lapangan				
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan Tanggap Darurat Banjir				
		Perjalanan Dinas Luar Daerah kegiatan Tanggap Darurat Banjir				
		Koordinasi ke dalam daerah dalam rangka penanggulangan bencana				
		Konsultasi dan koordinasi ke luar daerah dalam				
		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber kegiatan				
49.13	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih (Revisi)	Bahan Disinfektan @ 5 Liter		300 Liter	0 Liter	
		Larutan Pemutih @ 1 Liter		1,000 Liter	1000 Liter	
		Cairan Pembersih Lantai @ 5 Liter		1,000 Liter	0 Liter	
		Hand Sanitizer @ 500 ml		1,000 Liter	1000 Liter	
		Tempat Sampah		5 Buah	0 Buah	
49.13	Belanja Paket Pengiriman					
49.13	Belanja Spanduk dan Banner					
49.13	Baliho					
49.13	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Posko (Revisi)					
49.13	Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Revisi)	Pakaian Kerja Lapangan		60 Buah	60 Buah	
		Jas Hujan		60 Pasang	60 Pasang	
		Sepatu BOOTS		60 Pasang	60 Pasang	
		Hand scoon Panjang		50 Box	50 Box	
		Face Shield		60 Buah	60 Buah	
		Kacamata Safety		60 Buah	60 Buah	
49.13	Belanja Pengadaan alat-alat kedokteran umum (Revisi)	Masker N95		48 Box	48 Box	
		Masker Kesehatan		2,000 Box	2000 Box	
49.13	Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggulangan Bencana	Portable water pump		2 Unit	1 Unit	
		Penyemprot otomatis		10 Buah	10 Buah	
		White Board		2 Buah	2 Buah	
		Mesin Genset		1 Unit	1 Unit	
		AC (PendingIn Ruangan)		2 Buah	2 Buah	
		Kipas Angin		2 Buah	2 Buah	
		Alat komunikasi Radio HF/FM		1 Unit	1 Unit	
		Thermal Gun		2 Unit	2 Unit	
49.14	Pengembangan Sistem Manajemen					92.46
49.14	Pengembangan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan					92.46
49.14	Pengembangan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan	Bahan Bakar Minyak/Gas Peralatan Penanggulangan Bencana		2250 Liter	1228.8 Liter	92.46
		Pelumas Kendaraan PB		150 Liter	50 Liter	
		Pengandaan/foto copy/Penjiilidan Dokumen Kegiatan Manajemen Logistik dan Peralatan		1,930 Lembar	0 Lembar	
		Sewa Uang Tambat Speed Boat		12 Bulan	6 Bulan	
		Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan		23 OT	0 OT	
		Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan		1 OT	1 OT	
49.14	Belanja Peralatan dan kelengkapan Kesehatan					
49.14	Belanja Persediaan Bahan Kebutuhan Makanan					
49.14	Belanja Kebutuhan Sandang					
49.15	Pengembangan SDM dan Informasi					100.00
49.15	Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana	Alat Tulis Bimbingan Teknis SAR, Bimtek Pembekalan Team Reaksi Cepat (TRC)		0 Kegiatan	0 Kegiatan	100.00
		Alat / Perlengkapan Peserta Bimtek SAR, Alat / Perlengkapan Peserta Bimtek Pembekalan Team Reaksi Cepat (TRC)		0 Buah	0 Buah	
		Publikasi Bimtek SAR, Publikasi Bimtek Pembekalan Team Reaksi Cepat (TRC)		0 Kegiatan	0 Kegiatan	

		Spanduk Bimtek SAR, Spanduk Bimtek Pembekalan Team Reaksi Cepat (TRC)		0 Lembar	0 Lembar	
		Dokumentasi Bimtek SAR dan Dokumentasi Bimtek Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)		0 Kegiatan	0 Kegiatan	
		Sertifikat Pelatihan SAR dan Sertifikat Bimtek Team Reaksi Cepat (TRC)		0 Lembar	0 Lembar	
		Materi Peserta Bimtek SAR		0 Lembar	0 Lembar	
		Laporan Keg Bimtek SAR		0 Laporan	0 Laporan	
		Materi Peserta Bimtek Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)		0 Lembar	0 Lembar	
		Laporan Bimtek Pembekalan Team Reaksi Cepat (TRC)		0 Laporan	0 Laporan	
		Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Bimtek SAR dan Rapat Bimtek Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)		0 Kotak	0 Kotak	
		Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka kegiatan Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana		2 OT	2 OT	
		Perjalanan Dinas luar daerah dalam rangka kegiatan Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana		0 OT	0 OT	
		Honorarium Narasumber Bimtek SAR		0 Orang	0 Orang	
		Honorarium Narasumber kegiatan Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)		0 Orang	0 Orang	
49.16	Pusat Pengendalian Operasi					97.78
49.16	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)	Alat Tulis Kantor pada kegiatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)		1 Kegiatan	0 Kegiatan	97.78
		Spanduk Kegiatan Rapat Koordinasi PUSDalops PB dan Pengarsipan PUSDalops BPBD Kab/Kota Se Kaltim		2 Buah	0 Buah	
		Laporan Kejadian Bencana Se Kalimantan Timur		12 Laporan	0 Laporan	
		Laporan EWS		12 Laporan	0 Laporan	
		laporan Sebaran Titik Panas (Hotspot) di Kaltim		12 Laporan	0 Laporan	
		Laporan Kejadian Bencana di Kaltim Tahun 2020		16 Laporan	0 Laporan	
		Data Informasi Kaji Cepat, Monitoring Evaluasi dan Rapat Koordinasi PUSDalops PB		15 Laporan	0 Laporan	
		Laporan Kegiatan Pengarsipan BPBD Kab/Kota Se Kaltim		10 Laporan	0 Laporan	
		Pengandaan/foto copy Kegiatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)		10,000 Lembar	0 Lembar	
		Penjilidan Dokumen Kegiatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)		60 Laporan	0 Laporan	
		makan dan Minum Rapat PUSDalops		10 Bulan	4 Bulan	
		Makan dan Minum Kegiatan Rapat Koordinasi PUSDalops PB		0 Kotak	0 Kotak	
		Makanan dan Minuman Pengarsipan PUSDalops PB		0 Kotak	0 Kotak	
		Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka kegiatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)		10 OT	2 OT	
		Perjalanan Dinas luar daerah dalam rangka kegiatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)		2 OT	0 OT	
		Honorarium Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi PUSDalops PB BPBD Kab/Kota Se Kaltim		0 Orang	0 Orang	
		Honorarium Narasumber Kegiatan Pengarsipan PUSDalops PB BPBD Kab/Kota Se Kaltim		0 Orang	0 Orang	
		Belanja Dokumentasi Kegiatan Data Informasi Kaji Cepat, Monitoring Evaluasi, Rapat Koordinasi PUSDalops PB dan Pengarsipan PUSDalops PB		400 Lembar	0 Lembar	
1.05.51	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah					98.07
51.03	Penanggulangan bencana berbasis masyarakat					98.12
51.03	Penanggulangan bencana berbasis masyarakat	Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan Penanggulangan bencana berbasis masyarakat		1 OT	1 OT	98.12
		Perjalanan Dinas luar Daerah kegiatan Penanggulangan bencana berbasis masyarakat		1 OT	1 OT	
		Alat Tulis Kantor kegiatan Bimtek Relawan				
		Kelengkapan untuk Peserta Bimtek Relawan				
		Spanduk kegiatan Bimtek Relawan				
		Laporan kegiatan Bimtek Relawan				
		DESTANAPenanggulangan Bencana				
		Dokumentasi kegiatan Bimtek Relawan				
		Makanan Dan Minuman Rapat Kegiatan				
		Makanan dan minuman kegiatan Bimtek				
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan Bimtek				
		Jumlah peserta yang mengikuti Bulan Peringatan				
		Honorarium Tenaga				
51.04	Penyusunan Data Base dan Pemetaan Rawan Bencana					100.00
51.04	Penyusunan Data Base dan Pemetaan Rawan Bencana	Perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan Penyusunan Data Base dan Pemetaan Rawan Bencana		1 OT	1 OT	100.00
		Perjalanan Dinas luar Daerah kegiatan Penyusunan Data Base dan Pemetaan Rawan Bencana		1 OT	1 OT	
51.16	Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan					99.98
51.16	Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan	Cetak pada kegiatan Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan		2 Dokumen	0 Dokumen	99.98
		Pengandaan/Fotocopy/Penjilidan kegiatan Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan		200 Lembar	0 Lembar	
		Dokumentasi kegiatan Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan		50 Lembar	0 Lembar	
		Makanan Dan Minuman Rapat kegiatan Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan		60 Kotak	0 Kotak	
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka kegiatan Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan		13 OT	11 OT	
		Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka kegiatan Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan		3 OT	2 OT	
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka kegiatan Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan				
		Jumlah peserta yang mengikuti Hari				

		Perjalanan Dinas Luar Daerah				
		Alat Tulis Kantor kegiatan Kesiapsiagaan				
		Spanduk kegiatan Simulasi dalam rangka Hari				
		Cetak, Penggandaan dan dokumentasi kegiatan				
		Makanan Dan Minuman Rapat kegiatan				
51.17	<b>Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi</b>					<b>95.96</b>
51.17	Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan					95.96
51.17	Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan	Alat Tulis Kantor kegiatan review dokumen rencana kontijensi bencana dan simulasi penanggulangan bencana		1 Kegiatan	1 Kegiatan	95.96
		Publikasi kegiatan pelayanan informasi rawan bencana		3 Lembar	0 Lembar	
		Cetak kegiatan review dokumen rencana kontijensi bencana dan simulasi penanggulangan bencana		14 Buku	8 Buku	
		Penggandaan/Fotocopy/penjilidan kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan		4,000 Lembar	3920 Lembar	
		Dokumentasi kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan		200 Lembar	155 Lembar	
		Makanan Dan Minuman Rapat kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan		75 Kotak	25 Kotak	
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan		3 OT	3 OT	
		Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan		2 OT	1 OT	
		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan		5 OK	5 OK	
51.17	Belanja makanan dan minuman kegiatan/pelatihan Renkon	Belanja makanan dan minuman kegiatan review dokumen rencana kontijensi penanggulangan bencana (Revisi)		240 pax	240 pax	
	<b>Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB)</b>					
	Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB)					
	Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembekalan Teknis PB Bagi Masyarakat/Relawan				
		Spanduk Pembekalan Teknis PB				
		Cetak Kegiatan Pembekalan Teknis PB				
		Penggandaan/Fotocopy/penjilidan Kegiatan Pembekalan Teknis PB				
		Dokumentasi Pembekalan Teknis PB				
		makanan dan minuman kegiatan Pembekalan Teknis PB600Orang16.67				
		Belanja pakaian life jacket Peserta Pembekalan				
		Narasumber Pembekalan Teknis PB Bagi Masyarakat/Relawan				
1.05.55	<b>Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana</b>					<b>75.58</b>
55.01	<b>Sosialisasi dan Rakornis Rehabilitasi</b>					<b>100.00</b>
55.01	Sosialisasi dan Rakornis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana					100.00
55.01	Sosialisasi dan Rakornis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Makanan dan Minuman Paket Fullday Kegiatan Sosialisasi dan Rakornis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		40 Pax	40 Pax	100.00
		Alat Tulis Kantor Kegiatan Sosialisasi dan Rakornis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana		1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		Spanduk Kegiatan Sosialisasi dan Rakornis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana		1 Buah	1 Buah	
		Penggandaan Materi Peserta Kegiatan Sosialisasi dan Rakornis Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana		1,680 Lembar	1680 Lembar	
		Makan dan Minum Rapat		28 Kotak	28 Kotak	
		Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka kegiatan Sosialisasi dan Rakornis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		3 OT	3 OT	
		Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka kegiatan Sosialisasi dan Rakornis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		3 OT	3 OT	
		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		2 Orang	2 Orang	
		Kelengkapan Untuk Peserta Kegiatan Sosialisasi Bidang RR Pasca Bencana				
		Dokumentasi Foto Kegiatan Sosialisasi Bidang RR Pasca Bencana				
		Cetak Sertifikat Kegiatan Sosialisasi Bidang RR Pasca Bencana				
		Laporan Kegiatan Sosialisasi Bidang RR Pasca Bencana				
55.02	<b>Penyusunan Rencana Aksi Pasca</b>					<b>0.00</b>
55.05	<b>Pendampingan/Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>					<b>99.44</b>
55.05	Pendampingan/Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Alat tulis kantor		1 Kegiatan	0 Kegiatan	99.44
		Cetak dokumen bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi		2,000 Lembar	0 Lembar	
		Penggandaan dan Penjilidan laporan		2,000 Lembar	0 Lembar	
		Makan dan Minum Rapat		33 Kotak	0 Kotak	
		Rapat Kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi				
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah		11 OT	7 OT	
		Perjalanan Dinas Dalam luar		11 OT	7 OT	
55.06	<b>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan</b>					<b>41.27</b>
55.06	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Alat Tulis Kantor Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi		1 Kegiatan	0 Kegiatan	41.27
		Penggandaan/penjilidan/Fotocopy Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi		2,000 Lembar	0 Lembar	
		Makanan Minuman rapat		30 Kotak	0 Kotak	
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi		20 OT	0 OT	

PENYESUAIAN TERHADAP PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019									
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PAKET	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI TAHUN LALU (2020)			TARGET DAN REALISASI 5/D JULI TAHUN 2021		
				TARGET	CAPAIAN	FISIK	TARGET	CAPAIAN	FISIK
1.05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								38.17
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana	95%				95%		40.36
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100 Persen				100 Persen		32.47
1.05.01.1.01.01	Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen				10 dokumen		114.52
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	9 laporan				5 laporan		42.84
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	3 Laporan				3 Laporan		12.51
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen				100 Persen		39.38
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan ASN	12 dokumen				12 dokumen		41.07
1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				12 dokumen		16.04
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Persen				0 Persen		0
1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian yang Diadakan	0 stel				0 stel		0
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen				100 Persen		36.22
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor	41 unit				0 unit		0
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 laporan				12 laporan		30.20
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi	80 OT				145 OT		36.4
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen				100 Persen		50.03
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan				12 Laporan		36.77
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Gaji Non PNS dan BPJS	12 Laporan				12 Laporan		53.1
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 Persen				100 Persen		28.18
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional	10 unit				58 unit		17.3
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	50 unit				64 unit		60.4
1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	3398 m2				3398 m2		36.1
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	82.67%				66.67%		29.04
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan	100 Persen				100 Persen		45.89
1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana	1 dokumen				1 dokumen		45.89
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 Persen				100 Persen		18.58
1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan bencana	1 dokumen				1 dokumen		9.06
1.05.03.1.02.03	Pengendalian operasi dan penyediaan Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Laporan Pendetaan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan	12 Laporan				12 Laporan		13.38
1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk	12 Desa / Kelurahan				4 Desa / Kelurahan		26.56
1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana	5 Laporan				5 Laporan		36.07
1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi cepat (TRC) bencana	Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)	30 orang				30 orang		7.86
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	100 Persen				100 Persen		47.21
1.05.03.1.03.02	Respon cepat penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana	12 Laporan				12 Laporan		50.76
1.05.03.1.03.04	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	12 Laporan				12 Laporan		43.22
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen				100 Persen		6.36
1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan	1 Aplikasi				1 Aplikasi		6.36

Secara umum kegiatan dan program yang dilaksanakan tidak mencapai terhadap target, dan hanya beberapa indikator saja yang mencapai, disebabkan terdapat penyesuaian atau rasionalisasi pagu kegiatan pada beberapa uraian kegiatan, adapun rasioanalisis tersebut dilakukan dalam rangka pembiayaan penanganan wabah virus corona (COVID 19), stimulan terhadap masyarakat terdampak covid 19 dan peningkatan ekonomi masyarakat di provinsi Kalimantan Timur. Sehingga pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan kebijakan yang merupakan mengikut terhadap keputusan pusat, yaitu realokasi anggaran APBD Tahun 2021 yang dikhususkan terhadap penangan COVID 19 tersebut. Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 disampaikan hal – hal sebagai berikut :

a. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah :

1) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan :

- Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan , pada uraian output belanja penyiaran media elektronik Rapat Koordinasi Penanggulangan bencana, tidak dapat direalisasikan disebabkan adanya kendala teknis tenaga peliput dilapangan, kemudian kegiatan penilaian BPBD Kab/Kota tidak dilaksanakan karena terkait pelarangan pengumpulan massa selama COVID 19 ini.

2) Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Daerah :

- Kegiatan Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana, terhadap pagu murni yang ada kegiatan secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan, karena kegiatan secara umum dalam pelaksanaan mengumpulkan massa sehingga dilakukan realokasi dana untuk kebutuhan penangan COVID 19.

3) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah :



- Kegiatan Penanggulangan bencana berbasis masyarakat, terhadap pagu murni yang ada kegiatan secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan, karena kegiatan secara umum dalam pelaksanaan mengumpulkan massa sehingga dilakukan realokasi dana untuk kebutuhan penanganan COVID 19. Namun disebabkan kegiatan ini merupakan program prioritas gubernur Kalimantan Timur, kemudian diajukan anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada APBD P tahun 2020, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan terbentuk 1 desa/ kelurahan tangguh bencana.
- Kegiatan Penyusunan Data Base dan Pemetaan Rawan Bencana, terhadap pagu murni yang ada kegiatan secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan, karena terkait surat edaran gubernur Kalimantan Timur mengenai rasionalisasi terhadap belanja uraian belanja khususnya belanja pengadaan dilakukan realokasi dana untuk kebutuhan penanganan COVID 19.

4) Program Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana :

- Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pasca Bencana, terhadap pagu murni yang ada kegiatan secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan, karena terkait surat edaran gubernur Kalimantan Timur mengenai rasionalisasi terhadap belanja uraian belanja khususnya tidak diperbolehkan untuk pengumpulan massa sehingga dilakukan realokasi dana untuk kebutuhan penanganan COVID 19.

b. Program/kegiatan yang masih berjalan dan belum maksimal memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan:

- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

- 3) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan kegiatan:
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
- 4) Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana dengan kegiatan:
  - Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggulangan Bencana
  - Pengembangan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan
  - Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
- 5) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah:
  - Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan
  - Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan
- 6) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dengan kegiatan :
  - Sosialisasi dan Rakornis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
  - Pendampingan/Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan

Adapun hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya kinerja program/kegiatan :

1. Masih terdapat ketidaksesuaian rencana kerja dan penganggaran, rencana kerja yang didesain atau disusun tidak diikuti dengan pembiayaan yang optimal
2. Penyesuaian/rasionalisasi anggaran yang kemudian dana tersebut dialihkan (realokasi) untuk penanganan wabah virus corona (COVID 19), sehingga terjadinya pengurangan pagu anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

d. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan adanya rasionalisasi anggaran perangkat daerah tentunya berpengaruh terhadap capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur karena pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia sehingga realisasi program dan kegiatan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu penyesuaian pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Review) secara berkala.

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD**

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian kinerja pelayanan tahun 2022 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan arah atau tema pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023 Provinsi Kalimantan Timur yaitu terkait investasi suatu wilayah atau kawasan yaitu memberikan keadaan kondusif terkait manajemen penanggulangan bencana pada wilayah atau kawasan pembangunan.
2. Terkait salah satu misi Gubernur Kalimantan Timur yaitu Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yang merupakan misi ke - 4 (empat) , serta dengan tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai lembaga yang berperan dalam upaya mitigasi atau pengurangan terhadap dampak lingkungan sebagai akibat dari bencana, yaitu dengan meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana, pemaduan program

kegiatan, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.

3. Mengembangkan sistim penanggulangan bencana yang handal di Kalimantan Timur, yaitu dengan peningkatan responsif mandiri daerah dalam penanganan bencana, kemandirian wilayah atau daerah dalam upaya penanggulangan bencana secara dini.
4. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, yaitu dengan membangun komitmen bersama para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sesuai Visi dan Misi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 maka hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Rencana Strategis BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Prov. Kaltim  
Tahun 2019-2023

**VISI : " BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT"**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						
						Kondisi Awal 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi akhir
1.	Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan (Misi 4 (empat))	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup (Tujuan ke 6)	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana (Sasaran ke 24)	Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	60	0	70.67	80	90.67	100	100
2.	Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang handal di Kalimantan Timur	Mewujudkan ketangguhan masyarakat dengan peningkatan pengetahuan dan sumber daya melalui sistem yang terintegrasi	Meningkatnya responsifitas dalam penanganan bencana	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah Dalam Penanganan Bencana	%	85	87	88	89	90	91	91
				Persentase Logistik Kemanusiaan (Humanitarian Logistic)	%	75	75	80	85	85	85	85
3.	Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh	Membangun komitmen bersama para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Terwujudnya mekanisme pendukung dalam menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana yang lebih	Prosentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan	%	5	5	25	45	65	85	85

Kemudian dilakukan penyesuaian terhadap permendagri nomor 90 tahun 2019 dengan tabel sebagai berikut :

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						
						Kondisi Awal 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi akhir
1.	Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan (Misi 4 (empat))	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup (Tujuan ke 5)	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana (Sasaran ke 17)	Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	60	0	61,33	66,67	82,67	100	100

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 tertuang dalam capaian Sasaran Strategis tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Prov. Kaltim**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					REALISASI			PROYEKSI	CATATAN	
			2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021		
1.	Prosentase desa/ kelurahan tangguh bencana	%	0	70,67	80	90,67	100	60	-	61,33	80	Target dari 20 desa/kelurahan desa tangguh bencana , dapat terbentuk 12 desa tangguh bencana untuk rencana kerja pada periode 2014-2018, beberapa tahapan yang harus kembali disesuaikan karena anggaran yang kurang mencukupi, pada tahun 2019 kembali tidak tersedianya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan pembentukan desa / kelurahan tangguh bencana. Anggaran yang tersedia hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana yang telah terbentuk yaitu pada 2 (dua) desa 1) Desa Sepaso di Kabupaten Kutai Timur dan 2) Kelurahan Saloloang di Kabupaten Penajam Paser Utara.	realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 61,33 %, dengan capaian kinerja sebesar 100 % sesuai yang ditargetkan, mengalami kenaikan 2,22 % dari tahun 2019. Tahun 2019 kegiatan pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, realisasi tahun 2019 (60 %) merupakan angka kumulatif dari tahun sebelumnya, kegagalan jika karena banyak kegiatan-kegiatan yang seharusnya mendukung atau mendukung terhadap penurunan indeks risiko bencana dalam arti luas tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan dan adanya recofusing anggaran untuk percepatan penanganan covid-19
2.	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah Dalam Penanganan Bencana	%	87	88	89	90	91	87	75	80		Cakupan luasan kawasan. Kemudian berdasarkan pada realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 75 % dari target sebesar 87 %, tidak ada peningkatan ataupun penurunan capaian indikator kinerja karena merupakan tahun pertama Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.	Peningkatan pada tahun anggaran 2020 dipicu dengan adanya kegiatan percepatan penanganan covid-19. Walaupun anggaran untuk pelaksanaan kegiatan mengalami recofusing anggaran untuk penanganan covid-19 namun BPBD Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan dana BTT Tahap I yang penggunaannya hanya untuk kegiatan percepatan penanganan covid-19 dimana dana tersebut masuk ke dalam DPA Rasionalisasi BPBD Provinsi Kalimantan Timur sehingga secara tidak langsung ikut mendukung peningkatan capaian indikator kinerja ini
	Persentase Logistik Kemanusiaan (Humanitarian Logistic)	%	75	80	85	85	85	75	60	75		Prosentase Logistik Kemanusiaan (Humanitarian Logistic) realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 60 %, tidak ada peningkatan ataupun penurunan capaian indikator kinerja karena merupakan tahun pertama Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.	Peningkatan ini didongkrak dengan adanya pengadaan logistik kemanusiaan dengan anggaran yang sangat terbatas karena recofusing anggaran untuk percepatan penanganan covid-19, disamping itu juga didukung dengan adanya logistik dari bantuan BNPB sebagai bufferstock yang didistribusikan kepada BPBD Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur
3.	Prosentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan	%	5	25	45	65	85	5	5	20			pada tahun 2020 Kegiatan pada bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada tahun 2020 banyak yang tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya recofusing anggaran untuk percepatan penanganan covid-19 sehingga berpengaruh terhadap capaian target kinerja.



## **2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **a. Tingkat Pelayanan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

#### **Prov. Kaltim**

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai dengan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2009, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil, setara dan tepat sasaran;
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana;
- 7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 ditetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu :

- 1) Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana
- 2) Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah Dalam Penanganan Bencana

Berdasarkan pada RPJMD P 2019-2023 Provinsi Kalimantan Timur, serta berdasarkan pada penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan maka sasaran strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur dilakukan penyesuaian 1 (satu) sasaran strategis dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu persentase desa/kelurahan tangguh bencana.

**b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.**

Berdasarkan analisa faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang dimiliki serta dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- 1) **Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana**, hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi

dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah: (1) Belum Optimalnya kinerja aparaturnya kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; dan (2) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah: (1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; (2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat; (3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial; (4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta (5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

- 2) **Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana**, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain: (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan

pembangunan secara efektif dan komperhensif; (3) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah.

- 3) **Meningkatnya jumlah kejadian bencana setiap tahunnya**, hal yang sama tentu di ikuti dengan dampak yang ditimbulkan. Perlu adanya pengembangan kemandirian masyarakat dalam upaya menghadapi bencana

**c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

Sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023, Visi Provinsi Kalimantan Timur adalah :

**"Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat"**

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan cita-cita Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur, dengan mendukung misi pemerintah provinsi Kalimantan Timur yaitu " **Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan** ", dengan sasaran

Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana (Sasaran ke 16) Keterkaitan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

**d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

Disamping permasalahan-permasalahan seperti pada point b diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

- 1) Melaksanakan sosialisasi peraturan dan perundangan serta mengembangkan saint (pengetahuan), teknologi dan informasi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 2) Meningkatkan koordinasi badan penanggulangan bencana daerah dengan Instansi Pusat dan Daerah dengan memanfaatkan fasilitasi, bantuan teknis dan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan menambah sarana prasarana penunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 4) Memperluas kerjasama dengan LSM, Ormas, Ornop dan masyarakat untuk penanggulangan bencana.
- 5) Membuat, memperbanyak dan mendistribusikan kepada masyarakat pedoman-pedoman singkat yang mudah dimengerti tentang cara penyelamatan dalam menghadapi atau saat bencana.

- 6) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.
- 7) Mendayagunakan kemampuan yang ada, melakukan mobilisasi, modifikasi untuk mengantisipasi perubahan kondisi social ekonomi yang dapat berdampak timbulnya bencana.
- 8) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kebencanaan untuk meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap bencana melalui media.
- 9) Kualitas Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang handal dan memadai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang kebencanaan yang baik.
- 10) Mengembangkan inovasi untuk sosialisasi dan promosi kepada masyarakat guna meningkatkan kepedulian terhadap usaha-usaha penanggulangan bencana, baik pada saat tidak ada bencana, tanggap darurat maupun pascabencana.
- 11) Mendayagunakan kapasitas yang ada dan sarana prasarana yang tersedia untuk promosi kegiatan penanggulangan bencana.
- 12) Menganalisis data dan informasi hazard dan risiko yang ada untuk mengkaji perubahan kondisi social ekonomi yang dapat berdampak negatif ataupun menimbulkan bencana.

## **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Bahwa terkait mulai dilaksanakan penyesuaian terhadap nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan terhadap peraturan menteri dalam

negeri nomor 90 tahun 2019 yang telah dilaksanakan mulai tahun 2021, BPBD Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan penyesuaian tersebut. Pada tahun 2021, akan dilaksanakan 23 sub kegiatan yang terdiri dari 2 program, program penunjang urusan dan program penanggulangan bencana, hanya saja akan akan kembali dilakukan penyesuaian pada 2 (dua) sub Kegiatan, hal ini disebabkan tidak terdatanya sub kegiatan tersebut pada RKPD murni tahun 2021, maka sebagai tindak lanjut dilakukan penyesuaian pada RKPD Perubahan Tahun 2021.

## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim tahun 2021 merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023 dan penyesuaian terhadap refocusing anggaran dalam rangka penanganan wabah covid-19.

## BAB III

# TUJUAN DAN SASARAN

### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Ditingkat nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Sekretariat Utama dan bersama-sama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melaksanakan amanat Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu mengintegrasikan kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2020-2024 menitikberatkan pada *upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan iklim serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.*

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, sesuai amanat Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, adalah berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal selanjutnya, Pasal 3, disebutkan bahwa asas-asas pokok dalam penanggulangan bencana meliputi asas kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; ketertiban dan kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian lingkungan hidup; dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara prinsip-prinsip penanggulangan



bencana mencakup prinsip cepat dan tepat; prioritas; koordinasi dan keterpaduan; berdaya guna dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan; pemberdayaan; non-diskriminatif; dan non-proletisi.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini, sesuai ketentuan Pasal 6, meliputi pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; pemulihan kondisi dari dampak bencana; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur, dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah dimana kewenangan pemerintah daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku SKPD yang bergerak di bidang kebencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berpedoman kepadanya.

**Dalam situasi normal**, Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota lebih menjalankan fungsi koordinasi dan

pelaksana kegiatan pencegahan, pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan.

**Dalam situasi darurat** Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan fungsi komando, koordinasi dan sekaligus pelaksana kegiatan tanggap darurat. Dalam situasi ini BPBD dapat mengatur instansi-instansi sektoral dalam operasi tanggap darurat dalam situasi tanggap darurat bencana.

**Dalam situasi pasca bencana** Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali menjalankan fungsinya dalam hal koordinasi dan pelaksana kegiatan-kegiatan pemulihan, sementara fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawab instansi-instansi sektoral tetap dilaksanakan oleh sektor masing-masing. Pelaksanaan penanggulangan bencana di pusat maupun daerah akan memerlukan koordinasi dengan semua sektor dan unsur masyarakat. Pembagian peran di antara para pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana juga akan menjadi hal yang diatur melalui Rencana Strategis BPBD Kaltim.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD**

Rencana Kinerja Tahun 2021 pada Badan Penanggulangan bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak lepas dari tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang telah dirumuskan yaitu sesuai dengan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dimaksud sebagai dasar Penyusunan Kebijakan, Program, Indikator (tolak ukur kinerja) kegiatan BPBD dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan Gubernur Kalimantan Timur:

1. Meningkatkan kapasitas daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana;
2. Mewujudkan ketangguhan masyarakat dengan peningkatan pengetahuan dan sumber daya melalui sistem yang terintegrasi;
3. Membangun komitmen bersama para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dengan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana, Peningkatan Responsif Mandiri Daerah Dalam Penanganan Bencana , Pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) serta dukungan pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta alat transportasi yang memadai yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, dan pemulihan baik rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

Sejalan dengan sasaran pembangunan daerah berdasarkan Visi ***"Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat"*** pada Misi Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan. Maka sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi terwujudnya tujuan 5 (lima) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang telah dicanangkan dalam waktu 2019-2023 dan dengan sasaran Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana (Sasaran ke 16), yang merupakan salah satu program strategis RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi,

tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka program yang akan di laksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan serta anggaran yang tersedia. Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 meliputi berdasarkan pada RKPD Perubahan Tahun 2021, yaitu :

**1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, yang meliputi antara lain :**

Program dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat pada Subbag Umum, dan Subbag Keuangan:

**a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

**b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :**

- Penyediaan Bahan Logistik kantor
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Program dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat pada Subbag Penyusunan Program;

**e. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :**

- Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**2. Program Penanggulangan Bencana Daerah, pada bidang-bidang BPBD Provinsi Kalimantan Timur.**

Selanjutnya dalam kegiatan dan sub kegiatan pokok sebagai penjabaran program dalam rangka penanggulangan bencana 2019 – 2023 BPBD Provinsi Kalimantan Timur, adalah:

**a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi :**

- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi

**b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana :**

- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- Pengendalian operasi dan penyediaan Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana

- Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
- Penanganan Pascabencana Provinsi
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi cepat (TRC) bencana

**c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban**

**Bencana :**

- Respon cepat penanganan Darurat Bencana
- Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana

**d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana :**

- Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan

## BAB IV

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

### 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dijabarkan pada tabel IV.1

Tabel. IV.1 Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Kode	URAIAN RENSTRA	OUTPUT RENSTRA	Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	11	12	13
1.05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				14.399.598.000
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana		95 %	12.101.103.532
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		100 Persen	92.162.094
1.05.01.1.01.01	Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	smd	10 dokumen	15.975.294
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	smd	5 laporan	32.548.300
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	smd, Kab. Kutai Timur	3 Laporan	43.638.500
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	9.158.323.000
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	smd	12 dokumen	8.895.403.000
1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	smd	12 dokumen	262.920.000
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0 Persen	-
1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian yang Diadakan	smd	0 stel	-
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pemenenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	567.377.190
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor	smd	0 unit	-
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	smd	12 laporan	103.624.180
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi	10 Kab/Kota	145 OT	483.753.010
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	1.872.527.292
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	smd	12 laporan	339.161.580
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Gaji Non PNS dan BPJS	smd	12 laporan	1.533.365.712

1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		100 Persen	390.713.956
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional	smd	58 unit	258.048.956
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	smd	64 unit	41.265.000
1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	smd	3398 m2	91.400.000
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana		66,67 %	2.298.494.468
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan		100 Persen	229.409.823
1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana		1 1 dokumen	229.409.823
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100 Persen	1.292.463.370
1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan bencana	Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Bontang, Mahakam Ulu	1 dokumen	373.350.650
1.05.03.1.02.03	Pengendalian operasi dan penyediaan Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Laporan Pendetaan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan	10 Kab/Kota	12 laporan	98.815.600
1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk	Kutai Kartanegara (2 Desa/Kelurahan), Samarinda 2 desa/Kelurahan	4 Desa/ Kelurahan	292.686.200
1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana	10 Kab/Kota	3 laporan	256.515.020
1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi cepat (TRC) bencana	Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Kota Balikpapan	30 orang	271.095.900
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana		100 Persen	709.438.775
1.05.03.1.03.02	Respon cepat penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana	Smd	12 laporan	404.227.650
1.05.03.1.03.04	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	9 kab/Kota	12 laporan	305.211.125
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Prov. Kaltim	100 Persen	67.182.500
1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan	Prov. Kaltim	1 aplikasi	67.182.500



# BAB V

## PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BPBD) Tahun 2021 disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis Tahun 2019 – 2023, serta penyesuaian terhadap perubahan kebijakan pembangunan dan kondisi dalam upaya penanganan Covid 19.

Diharapkan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 2021 ini akan memberikan peran dalam meningkatkan koordinasi berkaitan dengan tugas-tugas kebencanaan dan senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi masyarakat umum terutama masyarakat Kalimantan Timur. Salah satu faktor pendukung penentu sukses dan tidaknya pelaksanaan kegiatan adalah faktor pendanaan. Jumlah anggaran yang diperoleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan baik itu pelaksanaan kegiatan di sekretariat maupun pelaksanaan kegiatan pada bidang.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021.

Samarinda, 24 September 2021  
**Kepala Pelaksana,**

**Yudha Pranoto, S.E.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196408172010061001

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2021**

Kode	URAIAN RENSTRA	OUTPUT RENSTRA	Rencana Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	11	12	13	14	15	16
1.05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				14,399,598,000			16,829,418,000
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana		95 %	12,101,103,532		95 %	13,401,024,012
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		100 Persen	92,162,094		100 Persen	169,300,980
1.05.01.1.01.01	Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	smd	10 dokumen	15,975,294	smd	10 Dokumen	25,362,450
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	smd	5 laporan	32,548,300	smd	9 Laporan	54,200,000
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	smd, Kab. Kutai Timur	3 Laporan	43,638,500	smd, 9 kab/kota	3 Laporan	89,738,530
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	9,158,323,000		100 Persen	9,863,018,583
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	smd	12 dokumen	8,895,403,000	smd	12 Dokumen	9,554,098,583
1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	smd	12 dokumen	262,920,000	smd	12 dokumen	308,920,000
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0 Persen	-		0 Persen	-
1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian yang Diadakan	smd	0 stel	-		0 stel	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pemenenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	587,377,190		100 Persen	1,118,941,712
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor	smd	0 unit	-	smd	41 unit	598,536,000
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	smd	12 laporan	103,624,180	smd	12 Laporan	65,000,000
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi	10 Kab/Kota	145 OT	483,753,010		80 OT	455,405,712
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	1,872,527,292		100 Persen	1,874,165,712
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	smd	12 laporan	339,161,580	smd	12 Laporan	340,800,000
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Gaji Non PNS dan BPJS	smd	12 laporan	1,533,365,712	smd	12 Laporan	1,533,365,712
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		100 Persen	390,713,956		100 Persen	375,597,025
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional	smd	58 unit	258,048,956	smd	10 unit	100,000,000

Kode	URAIAN RENSTRA	OUTPUT RENSTRA	Rencana Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	11	12	13	14	15	16
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	smd	11 unit	41,265,000	smd	50 unit	100,000,000
1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	smd	3398 m2	91,400,000	smd	3398 m2	175,597,025
<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana</b>		<b>66.67 %</b>	<b>2,298,494,468</b>		<b>82.67 %</b>	<b>3,428,393,988</b>
<b>1.05.03.1.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>	<b>Persentase Pelayanan Pemenuhan Informasi Kebencanaan</b>		<b>100 Persen</b>	<b>229,409,823</b>	<b>Provinsi Kaltim</b>	<b>10 Persen</b>	<b>318,000,000</b>
1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana		1 1 dokumen	229,409,823		1 dokumen	318,000,000
<b>1.05.03.1.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		<b>100 Persen</b>	<b>1,292,463,370</b>		<b>100 Persen</b>	<b>2,094,347,950</b>
1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan bencana	Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Bontang, Mahakam Ulu	1 dokumen	373,350,650	Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim, Balikpapan, PPU, Paser, Bontang, Berau, Mahakam Ulu	1 dokumen	50,539,750
1.05.03.1.02.03	Pengendalian operasi dan penyediaan Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Laporan Pendetaan, Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan Penyebaran Informasi Kebencanaan	10 Kab/Kota	12 laporan	98,815,600	10 Kab/Kota	12 Laporan	340,271,250
1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana yang Terbentuk	Kutai Kartanegara (2 Desa/Kelurahan), Samarinda 2 desa/Kelurahan	4 Desa/ Kelurahan	292,686,200	PPU, Kubar, Kukar, Berau, Kutim, Paser	12 Desa / Kelurahan	777,294,950
1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana	10 Kab/Kota	3 laporan	256,515,020	10 Kab/Kota	5 Laporan	600,000,000
1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi cepat (TRC) bencana	Jumlah Peserta Pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Kota Balikpapan	30 orang	271,095,900	Kota Bontang	30 orang	326,242,000
<b>1.05.03.1.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana</b>		<b>100 Persen</b>	<b>709,438,775</b>		<b>100 Persen</b>	<b>903,546,038</b>
1.05.03.1.03.02	Respon cepat penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Respon Cepat Penanganan Bencana	Smd	12 laporan	404,227,650	Smd	12 Laporan	433,546,068
1.05.03.1.03.04	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Laporan Logistik Penanggulangan Bencana yang Tersedia	9 kab/Kota	12 laporan	305,211,125	9 kab/Kota	12 Laporan	469,999,970
<b>1.05.03.1.04</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Prov. Kaltim</b>	<b>100 Persen</b>	<b>67,182,500</b>		<b>100 Persen</b>	<b>112,500,000</b>
1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Jumlah Pengembangan Aplikasi Informasi Kebencanaan	Prov. Kaltim	1 aplikasi	67,182,500	Prov. Kaltim	1 aplikasi	112,500,000



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jalan M.T. Haryono, Telp. 0541-733766, 741040, Fax. 0541-205315  
**SAMARINDA**

---

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : 300/028 /BPBD- I/ 2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)**  
**TAHUN 2021**

**KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengembalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengendalian Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengembalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengendalian Daerah, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu membentuk panitia dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengembalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengendalian Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;  
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;  
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengangkat Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan-bahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021;
- b. Mengadopsi Data SIPD SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;
- c. Membuat Matrik Rencana Anggaran Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021;
- d. Melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Diktum PERTAMA Tim berpedoman pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA - SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada tanggal : 21 September 2021

KEPALA PELAKSANA,

**Yudha Pranoto, SE**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196408172010061001

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2021  
NOMOR : 300 /028 /BPBD-I / 2021  
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan Kegiatan</b>
1	Yudha Pranoto, SE	Pengarah
2	Ir. Herry Maryadi	Ketua
3	A. Rafiq, S. Sos	Sekretaris
4	Johan Wahyudi, S.Hut	Koordinator Rencana Kerja
5	Dodi Farid Munadi, S.Hut	Koordinator Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
6	Rudi Syafriadi, S.H	Koordinator Bidang Kedaruratan dan Logistik
7	Yasir, S.E., M.Si.	Koordinator Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
8	M Fahrijal Ihsan, S.Pd	Koordinator Sekretariat
10	Renita, S.Hut	Pengumpul/pengolah/entry data

KEPALA PELAKSANA,

**Yudha Pranoto, SE**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196408172010061001